



Relasi Kuasa dalam Tata Kelola Objek Wisata Pantai Sebanjar Studi Relasi dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Sebanjar

Siti J.K.S.Oramahi ^{1*}, Syahrin Badrin Kamahi ², Boli Tonda Baso ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Korespondensi penulis : SitiJaenaboramahi@gmail.com

***Abstract** The management of Sebanjar beach tourism objects is one form of improving the welfare of the community through the provision of supporting facilities and infrastructure. However, this management requires strategic power relations as the main means of managing tourism objects. This study examines the management of tourism objects that are hampered by the lack of power relations between the government and land owners at the location of the tourist attraction. This study seeks to determine and analyze the power relations in the governance of Sebanjar beach tourism objects in Alor Regency. This study aims to reveal the power relations held by the government towards the surrounding community and as land owners. The theory used is the theory of power put forward by Michael Foucault to support researchers in determining and analyzing the power relations of the management of Sebanjar beach tourism objects. Researchers use a qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this study prove that the management of tourist attractions does not always prosper the community. This is because there is a lack of power from the government as the manager of the Sebanjar beach tourist attraction. In the management process, there is an obstacle because the land owner claims that the land they have built is tribal land, not individual land where the land was donated by a family who has limited human resources and as the land owner asks for management to be carried out in a balanced manner. The conclusion of this study is the lack of power relations by the government towards the landowner community and the local community.*

***Keywords:** Power Relations, Governance, Tourist Attractions, Sebanjar Beach*

Abstrak Pengelolaan objek wisata pantai sebanjar merupakan salah satu bentuk untuk menyejahterakan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, Akan tetapi dalam pengelolaan tersebut membutuhkan relasi kuasa yang strategis sebagai sarana utama pengelolaan objek wisata. penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan objek wisata yang menjadi terhalang karena kurangnya relasi kekuasaan antara pemerintah dan pemilik lahan pada lokasi objek wisata. Studi ini berupaya untuk mengetahui dan menganalisis relasi kuasa dalam tata kelola objek wisata pantai Sebanjar di kabupaten Alor. penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan relasi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap masyarakat sekitar dan selaku pemilik lahan. Teori yang digunakan adalah teori kekuasaan yang di kemukakan oleh Michael Foucault Untuk mendukung peneliti dalam mengetahui dan menganalisis Relasi kekuasaan pengelolaan objek wisata pantai sebanjar. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data antara lain dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan objek wisata tidak selamanya menyejahterakan masyarakat. hal ini karena terdapat kekuasaan yang kurang dari pemerintah sebagai selaku pengelola objek wisata pantai sebanjar .dalam proses pengelolaan terjadi terhalang karena pemilik lahan mengklaim bahwa tanah yang sudah mereka bangun tersebut merupakan tanah milisuku bukan tanah milik perorangan yang dimana tanah itu di hibahkan oleh pihak keluarga yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan selaku pemilik lahan meminta untuk pengelolaan di kerjakan secara seimbang. kesimpulan penelitian ini adalah kuranaaagnya relasi kekuasaan oleh pemerintah terhadap masyarakat pemilik lahan maupun masyarakat setempat.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Tata Kelola, Objek Wisata, Pantai Sebanjar

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara. Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu sector yang dapat menguntungkan bagi pemerintah, pariwisata harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait dengan persoalan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang dari tahun ke tahun perlu adanya peningkatan wisatawan baik lokal maupun Mancan Negara. Manfaat pengembangan sektor pariwisata tidak hanya untuk peningkatan pendapatan daerah (PAD) tetapi juga yang paling penting dari suatu pembangunan daerah adalah mampu bermanfaat baik secara nyata dan terintegrasi seperti: bermanfaat dibidang pelestarian alam, bidang pariwisata, bidang ekonomi, dan bidang ketenagakerjaan.

Pengelolaan pariwisata adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam melestarikan Objek Wisata. Pengelolaan pariwisata yang ideal perlu memperhatikan misalnya, terkait dampak dan persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat di sekitar daerah tujuan Wisata Untuk menciptakan suatu tata kelola yang baik, seluruh pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata harus terlibat. Masyarakat, wisatawan, dan Pemerintah daerah harus saling terpadu untuk berupaya secara maksimal mengembangkan potensi tata kelola Wisata yang berkelanjutan

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana merupakan hal utama yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Namun dalam proses pembangunan untuk meningkatkan potensi lokasi wisata tentunya ada hambatan dan kendala dalam pembangunan tersebut. Misalkan pengerjaan dermaga yang tidak terealisasi di pesisir pantai wisata menyebabkan dampak yang kurang bagus untuk masyarakat sekitar yang dimana bagian tersebut juga bisa digunakan para pelaut untuk dijadikan tempat untuk mencari mata pencaharian tetapi dengan adanya pembangunan dermaga maka semua itu sudah mengurangi mata pencaharian masyarakat tersebut, maka dari itu kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang hidup berdekatan dengan pantai wisata sebanjar dan segala wacana yang yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga terjadinya mandek dalam pengerjaan pembangunan dermaga dan sampai saat ini dermaga tersebut tidak ada kelanjutan dari tahap ke tahap sehingga masyarakat juga merasa bahwa pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai prosedur dalam pengerjaan suatu bangunan pemerintah juga belum memalukan tindakan lebih lanjut dan terarah. Dengan adanya pembangunan dermaga yang tidak terealisasi tersebut mengakibatkan wisatawan lokal dan wisata asing kurang tertarik untuk berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Hal tersebut di sebabkan pembangunan yang

terjadi di lokasi pariwisata Pantai Sebanjar tidak begitu berkembang dan terkesan jalan di tempat. Masalah tersebut tidak bisa dipungkiri sebab masih dijumpai kendala- kendala dalam penyelenggaraan pembangunan yang belum juga terselesaikan. Misalkan pembangunan dermaga yang terletak di pantai wisata sebanjar terlihat dari segi pengerjaan baru hanya di mulai dengan 30% dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah dan pihak-pihak selaku pekerja untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah di kerjakan dengan anggaran yang di kucurkan pemerintah senilai 1.500.000.000 dan pembanguan lopo – lopo di pantai sebanjar yang kurang di perhatikan sehingga terkesan tidak terurus.

2. METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan menganalisis suatu fenomena terkait Relasi kuasa dalam tata kelola objek wisata pantai Sebanjar studi relasi dalam pengembangan objek wisata pantai Sebanjar secara mendalam untuk menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari studi dokumen dan hasil wawancara para informan. Pendekatan ini akan menampilkan hasil yang alamiah atas fenomena di lapangan dan memudahkan peneliti untuk lebih dekat dengan informan dalam menggali informasi secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Alor

Kabupaten Alor merupakan sebuah pulau yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Luas wilayahnya 2.119 km², dan titik tertingginya 1.839 m. Pulau ini dibatasi oleh Laut Flores dan Laut Banda di sebelah utara, Selat Ombai di selatan (memisahkan dengan Pulau Timor), serta Selat Pantardi barat (memisahkan dengan Pulau Pantar. Pulau Alor adalah satu dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan Timor Leste di sebelah selatan. Pulau Alor selain memiliki keindahan alam yang dapat dilihat secara langsung didaratan dan dipantai, juga memiliki keindahan alam dibawah laut berupa ikan-ikan langka nan indah serta karang dan tumbuhan-tumbuhan laut yang begitu mempesona.

Kabupaten Alor di lihat dari potensi alamnya, sektor pariwisata sangat produktif untuk dikembangkan, karena didukung oleh letak geografisnya, ditambah lagi dengan kultur masyarakat lokalnya yang kental dan ramah. Dalam pengembangan pariwisata selama ini, Kabupaten Alor sangat dikenal dengan objek wisata yang banyak diminati baik dari wisatawan lokal maupun mancan Negara Bukan hanya itu, hampir di setiap kecamatan yang

ada di Kabupaten Alor memiliki potensi objek wisata yang baik, namun sayangnya, potensi wisata yang ada di kecamatan maupun di desa kurang di manfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata didasarkan pada potensi yang dimiliki kabupaten Alor yang memang memiliki daya tarik wisata yang unik, peninggalan budaya memberikan warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi daerah ini.

Profil Desa Alor Besar

Desa Alor Besar terletak di kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Letak Desa ini di pesisir pantai yang sering di kategorikan sebagai Desa pesisir yang keadaan alamnya sangat gersang di saat musim kemarau sehingga menyulitkan warga masyarakat Desa Alor Besar untuk beraktifitas pada saat musim kemarau. Pada masa sebelum kemerdekaan wilayah Alor Besar (Bungabali) meliputi 10 Kampung Adang di Gunung, 3 Kampung Alor di Pesisir dan 7 Kampung di Pura, dan Alor Besar (Bungabali) dipimpin oleh seorang Raja dan pusat pelayanannya bertempat di Rumah Raja (Adat Pusungrebong). Raja ke 9 yang memimpin bernama Raja Kawiha Tuli. Masa kepemimpinan Raja Kawiha Tuli mulai dari tahun 1903 sampai dengan tahun 1908 dan di alihkan kekuasaannya ke Dulolong dan yang memimpin bernama A. B. Nampira.

Profil Pantai Sebanjar

Pantai Sebanjar berada di wilayah dusun II Sebanjar, Desa Alor Besar, kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Karakteristik lanskap kawasan pantai Sebanjar sangat unik karena mempunyai tiga karakteristik utama yaitu pantai landai, dataran rendah dan kawasan perbukitan. Ketiganya terintegrasi menjadi satu membentuk kawasan pantai yang menarik. Kondisi topografi cukup bervariasi yaitu sebagian berupa dataran rendah dan sebagiannya lagi kondisinya berbukit. Kondisi iklim mikro kawasan Pantai Sebanjar termasuk iklim pantai yang panas dengan suhu harian rata-rata mencapai 29° C.

Pantai Sebanjar berjarak sekitar kurang lebih 20 Km dari Kota Kalabahi-ibu kota Kabupaten Alor. Untuk mencapai objek wisata ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Pantai Sebanjar memiliki keunikan dengan keindahan pantai pasir putih dan air laut yang bersih, serta memiliki terumbu karang yang unik dan menawan. Pantai Sebanjar juga menyediakan fasilitas bagi pengunjung untuk berteduh berupa musholah, tempat parkir, rumah payung dan mandi cuci kakus (MCK). Selain itu telah tersedia fasilitas penunjang lainnya seperti *home stay* di lokasi Pantai Sebanjar, namun belum dimanfaatkan dengan baik.

Pembahasan

Deskripsi Relasi kuasa dalam tata kelola objek wisata pantai Sebanjar studi relasi kuasa dalam pengembangan objek wisata pantai Sebanjar

Tata kelola objek wisata pantai Sebanjar pemerintah melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Pembangunan sarana pendukung merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan tata kelola objek wisata. Sarana pendukung yang dimaksudkan di sini yakni *home stay*, lopo, dermaga, kolam dan sarana pendukung lainnya, hal ini seperti yang di sampaikan oleh kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Permasalahan mengenai Relasi kuasa dalam tata kelola terkhususnya di pantai sebanjar menjadi permasalahan yang belum dapat di atasi oleh pemerintah, meskipun pemerintah telah mencari jalan keluar agar objek wisata pantai sebanjar di kelola secara bersama namun masyarakat selaku pemilik lahan belum menyetujui akan perjanjian tersebut dan objek wisata pantai sebanjar sampai saat ini belum ada pengoprasian pengelolaan dengan pihak-pihak yang berwenang. hal tersebut masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, masih terdapat pihak keluarga yang belum menyetujui perjanjian kerja dari pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.

Adapun teori Relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michael Foucault terkait tata kelola objek wisata Pantai sebanjar peneliti menemukan bahwa dalam proses tata kelolanya merupakan salah –satu bentuk dari relasi kekuasaan antara aktor jika dilihat dari sudut pandang Foucault kekuasaan dipahami dalam beberapa pendapat

1. Kuasa bukanlah kepemilikan, tetapi strategi. Kuasa bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh, disimpan, digunakan, dibagi atau disebarluaskan. Kuasa dalam pandangan Foucault tidak dapat dimiliki, tetapi langsung dipraktikkan dalam suatu setting sosial tertentu yang melibatkan banyak posisi strategis dan berelasi satu sama lainnya, sehingga selalu mengalami pergeseran. Tata kelola objek wisata pantai sebanjar dilihat sebagai bentuk dari kekuasaan bukanlah kepemilikan melainkan strategi, hal ini di buktikan dengan relasi antara aktor yang memperebutkan ruang tersebut yakni antara pemerintah, swasta dan masyarakat. perebutan ruang antara aktor diatas.

Berdasarkan teori dan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan kepala bagian destinasi pariwisata kabupaten Alor Marcellius Bayo Bili, SE pada tanggal 29 April 2024 mengatakan Bahwa:

“Lokasi pantai sebanjar merupakan ruang strategis untuk di kembangkan menjadi sektor pariwisata unggul hal ini didukung dengan panorama alam sebanjar yang indah.

Ruang strategis ini kemudian menjadi sasaran kami sebagai pemerintah untuk mengelolanya menjadi destinasi wisata. Namun hal ini tidak menjadi mudah karena masyarakat dan pengusaha juga mulai tertarik dengan lokasi pariwisata pantai sebanjar. Masyarakat hadir dengan menuntut hak atas tanah, pengusaha pula hadir menuntut bahwa lokasi tersebut sudah menjadi haknya.”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti melihat bahwa lokasi pariwisata pantai Sebanjar selaras dengan pandangan Foucault bahwa kekuasaan bukanlah kepemilikan tetapi strategis. Hal ini didukung dengan apa yang dikatakan bapak Natsir Tullimau bahwa:

“kami sebagai keluarga sepakat dalam artinya bahwa bila lokasi pariwisata itu dibangun kami memintah pemerintah agar merekrut tenaga kerja dari desa alor besar itu sendiri, sebab sebagai pemilik lahan kami juga tidak ingin orang dari luar kemudian menguasai daerah tersebut sedangkan kami sendiri membutuhkan lapangan pekerjaan, kemudian yang membuat kami tidak puas dengan pemerintah bahwa lokasi objek pariwisata tersebut harus di ibahkan ke pemerintah namun tanpa pertimbangan bersama melainkan pengambilan keputusan sepihak.”

Dari masalah diatas aktor-aktor yang memiliki kepentingan atas ruang pantai Sebanjar melihatnya sebagai ruang strategis untuk peningkatan nilai ekonomi melalui sektor pariwisata dan peningkatan ketenaga kerjaan di desa itu sendiri dan juga .

2. Kuasa ada di mana-mana. Ini merupakan terma lanjut dari pandangan Foucault sebelumnya. Dalam pandangan ini, kuasa tidak dapat diidentifikasi milik perseorangan (aparatur negara) atau institusi (lembaga negara). Bagi Foucault, di mana saja selalu ada struktur dan aturan serta relasi yang khas antar manusia. Kondisi tersebut terhubung dengan dunia luar dan di situlah kuasa membuka prakteknya. Tentu saja setiap struktur masyarakat mengenal dan mengakui secara kokoh suatu yang dipandang benar. Pada konteks tersebutlah kuasa bekerja menentukan yang benar dan tidak benar untuk selanjutnya disebarluaskan. Pernyataan Foucault ini bila ditinjau dari masalah pengembangan sektor pariwisata pantai Sebanjar terlihat bahwa antara aktor saling berpegang teguh pada kepentingan masing-masing. Hal ini sepertinya yang dikatakan oleh bapak Sulaiman Tulimau Pada tanggal 8 Agustus 2024 bahwa:

“ Sebagai pemilik lahan kami menuntut proses pembebasan lahan pantai sebanjar untuk kepentingan pariwisata sesuai dengan procedural yang sebenarnya yakni kami menuntut untuk ganti rugi lahan dan menolak untuk diibahkan dengan alasan bahwa proses hibah di waktu yang lalu belum mencapai final atau dengan cara yang

sebenarnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilik lahan menuntut haknya untuk dipenuhi oleh pemerintah kabupaten Alor. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Natsir Tilimau, ia mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2015 pemerintah hadir dengan gagasan pembangunan sektor pariwisata pantai sebanjar. Gagasan yang dibangun tersebut di terima baik oleh masyarakat pemilik lahan asalkan melalui prosedural yang benar karena lahan tersebut tidak milik perseorangan atau individu melainkan tanah suku yang menjadi warisan turun temurun.”

Namun pemerintah berpegang teguh bahwa lokasi pantai sebanjar yang menjadi sasaran pariwisata sudah menjadi milik pemerintah Daerah karena sudah ada proses pemberian lahan dari pemilik lahan secara Cuma-Cuma atau dalam kata lain hibah. hal ini seperti yang di sampaikan oleh Marcellus Bayo Bili pada tanggal 29 April 2024 Bahwa:

“kami dari dinas pariwisata beserta pemda kabupaten Alor sebelum melakukan pembangunan di pantai sebanjar sebagai lokasi prioritas pariwisata sebelumnya kami telah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan untuk kemudian bernegosiasi terkait lokasi tersebut. pada proses negosiasi tersebut kami mendapatkan lahan secara hibah, oleh sebab itu kami merasa memiliki hak penuh untuk mengelola lokasi tersebut menjadi sasaran pariwisata.”

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa antara aktor pemerintah dan masyarakat memiliki kekuasaannya masing-masing kemudian berpegang teguh dan saling mengklaim siapa salah dan siapa benar yang pada akhirnya tidak memiliki keputusan atas siapa yang boleh mengeloah lokasi tersebut.

3. Kuasa bekerja melalui normalisasi dan regulasi. Pendapat Foucault ini menegaskan bahwa tidak selamanya kuasa bekerja melalui praktek penindasan dan represif. Oleh sebab itu, kuasa bukanlah milik raja, pemerintah atau laki-laki yang dapat membatasi, melarang atau berbuat sekehendaknya. Melalui normalisasi dan regulasi, kuasa dapat memproduksi realitas dan berbagai ritus kebenaran. Pandangan foucault ini bila dilihat dari kasus tata kelola pantai sebanjar bahwa sudah ada normalisasi dan regulasi namun dalam prosesnya belum memiliki titik pengambilan keputusannya disebabkan masih ada pro dan kontra antara aktor yakni Masyarakat dan pemerintah. hal ini seperti yang di sampaikan bapak Natsir Tilimau Pada tanggal 8 Agustus bahwa:

“rencana pembangunan objek wisata pantai sebanjar mulai di lakukan pada tahun 2015, yang diawali dengan pengadaan ruang konsolidasi antar masyarakat dan

pemerintah dan membahas terkait pantai sebanjar sebagai ruang strategis pembangunan objek wisata. Namun pada saat itu pula belum ada keputusan yang reeal, hanya ada keputusan sepihak dari pemerintah bahwa tanah tersebut di iabihkan oleh pemilik lahan kepada pemerintah. Keputusan ini mehadirkan masaalah dalam ruang tersebut sehingga masyarakat menolak adanya pembangunan tersebut karena tidak melalui prosedur yang benar dan merasa perintah tidak menghargai para pemilik lahan”

Pernyataan ini menunjukan adanya ruang regulasi yang berusaha dihadirkan oleh pemerintah. Namun ruang regulasi tersebut belum mendapatkan atau menciptakan keputusan akhir terkait pengelolaan lahan tersebut dan pada akhirnya di Tahun 2020 pemerintah mendaptak gugatan dari masyarakat seperti yang di katakan oleh bapak Marcelsius Bayo Bili, sebagai kepala destinasi pariwisata kabupaten Alor bahwa:

“pada tahun 2020 pemda dan dinas pariwisata mendapat tuntutan ganti rugi lahan pembangunan pariwisata pantai Sebanjar yang sebelumnya di berikan secara Cuma-Cuma. Oleh sebab itu pemda dan dinas pariwisata kabupaten Alor melakukan audiens dengan pemilik lahan guna memcari solusi dalam pemecahan masalah lahan pantai sebanjar. Pemerintah hadir dengan solusi bahwa lahan tersebut di bagi 50% untuk pemerintah degan lahan yang sudah ada sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan 50% untuk masyarakat dengan lahan yang belum di bangun sarana pendukungnya. Namun masyarakat pemilik lahan tidak meyetujui dan mengiginkan untuk pemerintah membayar penuh semua lahan yang digunakan untuk sasaran pembangunan.”

Hasil wawancara ini menunjukan bahwa pemeritah memiliki optimis tinggi untuk mencari solusi dan terus melakukan pembangunan. Namun solusi yang ditawarkan memberikan imprsei bahwa merugikan pihak pemilik lahan sehingga penolakan terus hadir dari masyarakat pemilik lahan hal ini menyebabkan proses tata kelola objek pariwisata pantai sebanjar menjadi proyek mubazir.

4. Kuasa bersifat produktif. Pendapat ini merupakan penolakan Foucault terhadap adanya Pandangan yang menyatakan kuasa itu bersifat menindas karena itu harus di tolak. Penolakan kuasa dalam pandangan tersebut justru merupakan bagian strategi mengukuhkan suatu kuasa, sebagaimana disebutkan pada pengertian pertama tentang kuasa. Karena kuasa ada di mana- mana, menjadi milik siapa saja dan bekerja melalui proses normalisasi dan regulasi, maka suatu kuasa bersifat produktif. Bagi Foucault, kekuasaan dan pengetahuan ibarat dua sisi dari satu mata uang. Kekuasaan dapat diartikulasikan melalui pengetahuan, namun pengetahuan selalu memiliki efek terhadap

kekuasaan. Karena itulah, untuk memahami kekuasaan, diperlukan analisis wacana tertentu, karena pada gilirannya suatu wacana mampu menghasilkan kebenaran. Kebenaran tidak jatuh dari langit atau seketika keluar dari perut bumi, tetapi hadir karena diproduksi. Setiap kekuasaan memiliki tendensi memproduksi kebenaran melalui penyebaran wacana. Pandangan Foucault ini selaras dengan kasus pembangunan lokasi pariwisata pantai Sebanjar dimana pemerintah hadir sebagai aktor yang memiliki kuasa untuk pengembangan sektor pariwisata demi menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui nilai ekonomi pariwisata, pernyataan ini didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marcelcius Bayo Bili SE. bahwa:

“Wisata Sebanjar berada di desa Alor Besar, desa ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata pada masa mendatang, sehingga dibutuhkan pemetaan potensi yang ada. Jika melihat keberadaannya potensi yang ada bila dikembangkan sangat menjanjikan. Kami dari dinas pariwisata melihat bahwa lokasi pantai Sebanjar menjadi lokasi yang sangat potensial untuk dijadikan sasaran objek wisata maka dari itu pemda mengeluarkan dana APBD pada tahun 2018 dengan jumlah anggaran 2.369.590.000 untuk pembangunan pagar pembatas, kios cendera mata, plaza kuliner, dan dive center dan berlanjut pada tahun 2019 anggaran yang dikeluarkan untuk rehabilitasi home stay sebesar 150.000.000.0 dan pada tahun 2020 untuk pembangunan toilet dan lansekap memakan anggaran berjumlah 257.400.000

Pernyataan kepala dinas peneliti melihat bahwa pemerintah melihat ruang pantai Sebanjar sebagai ruang kekuasaan yang produktif. Hal ini didukung juga oleh pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, Drs. Yulius Mantaon Padatanggal 28 Juli 2024 mengatakan bahwa:

“Sebagai wakil rakyat saya mendukung pembangunan objek wisata pantai Sebanjar yang pada intinya untuk kepentingan masyarakat. Objek wisata pantai Sebanjar menjadi daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Alor umumnya dan masyarakat Alor Besar khususnya. Daerah yang potensial ini selain menarik wisatawan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga memberi ruang kepada masyarakat dalam menjual kearifan lokalnya baik itu kerajinan tangan juga makanan tradisional yang dapat dikonsumsi oleh para wisatawan. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.”

Michel Foucault tentang kekuasaan dalam konteks pengembangan pariwisata di Pantai Sebanjar menunjukkan bahwa kekuasaan bisa berfungsi sebagai kekuatan produktif, tetapi juga dapat menimbulkan problematika jika tidak dikelola dengan

baik. Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya bersifat menindas tetapi juga produktif, beroperasi melalui normalisasi dan regulasi yang membentuk pengetahuan dan kebenaran. Dalam kasus pengembangan Pantai Sebanjar di Kabupaten Alor, kekuasaan pemerintah lokal dan aktor terkait berfungsi sebagai kekuatan produktif, mengarah pada peningkatan sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari kepala dinas pariwisata, DPRD, dan kepala desa menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata, memproduksi pengetahuan tentang potensi ekonomi dan sosial dari proyek tersebut, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ruang pantai sebanjar merupakan lokasi strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Alor juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.hal ini seperti yang disampaikan kepala desa Alor besar, Bapak Sirahudin Ali Pada tanggal 13 Mei bahwa:

“sebagai pemerintah desa saya mendukung penuh adanya pembangunan objek wisata pantai sebanjar. Saya melihat selain membuat desa Alor besar dikenal oleh dunia luar melalui sektor pariwisata ,sektor ini kemudian menjadi peluang bagi masyarakat desa Alor besar dalam meningkatkan UMKM masyarakat. “

Pernyataan kepala desa diatas kemudian didukung dengan hasil wawancara bersama ibu Suria Dahlan pada tanggal 28 April mengatakan bawa:

“Kami merasa bersyukur dengan kehadiran pembangunan objek wisata pantai sebanjar, karena dapat membantu meningkatkan ekonomi kami masyarakat dengan tersedianya ruang untuk kami menjajakan hasil kerajinan dalam hal ini Tenun khas masyarkat Alor besar.”

Hasil wawancara bersama ibu Suria Dahlan juga didukung oleh pernyataan ibu Saleha Tambe Pada tanggal 28 April mengatakana bahwa :

“Sebagai masyarakat Alor besar saya mengiginkan pembangunan objek wisata pantaisebanjar dapat di realisasikan agar kami dapat memanfaatkan ruang tersebut sebagai wadah untuk menjajakan kearifan lokal dalam hal ini menawarkan makanan khas kabupaten Alor maupun Desa Alor besar kepada para wisatawan yang berkunjung di pantai Sebanjar.”

Namun dari beberapa pernyataan diatas baik dari pemerintah ataupun masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut. Disisi lain sebagian masyarakat yang merupakan pemilih lahan objek wisata pantai sebanjar, hadir degan kepentingannya bahwa lahannya merupakan lokasi strategis untuk pembangunan objek wisata tersebut

belum adanya pembebasan lahan. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara bersama bapak Natsir Tulimau mengatakan bahwa:

“sebagai pemilik lahan kami sebetulnya mendukung niat baik pemerintah kabupaten Alor untuk melakukan pembangunan objek wisata pantai sebanjar. Namun sangat di sayangkan dalam proses pembangunan tersebut pemerintah mengambil keputusan sepihak bahwa lahan tersebut sudah di hibahkan tanpa melalui ruang konsolidasi bersama pemilik lahan. Hal ini meimbulkan kekecewaan dari pemilik lahan sehingga kami melakukan tuntutan ganti rugi. Dan pada tahun 2020 kami melayangkan gugatan kepada pemda Alor sampai pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Alor. Namun gugatan ini sampai sekarang belum memiliki keputusan.”

Namun, meski ada pandangan positif dari pemerintah dan masyarakat mengenai manfaat proyek ini, terdapat problematika terkait hak kepemilikan tanah dan proses pembebasan lahan. Pemilik lahan mengeluhkan kurangnya konsolidasi dan keputusan sepihak dari pemerintah, yang menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa hukum. Masalah ini menunjukkan bahwa kekuasaan juga dapat menimbulkan konflik ketika tidak melibatkan semua pihak yang terkena dampak atau tidak dilaksanakan dengan transparansi.

Pengembangan Pantai Sebanjar menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat memproduksi pengetahuan dan kebenaran mengenai manfaat ekonomi dan sosial. Namun, untuk memastikan kekuasaan digunakan secara produktif dan adil, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Berdasarkan hasil wawancara diatas meunjukkan bahwa kekuasaan bersifat produktif.halini didukung dengan realita yang terjadi di kabupaten Alor, Desa Alor besar bahwa didalam suatu ruang sosial setiap aktor melihat kekuasaan sebagai suatu hal yang produktif berangkat dari hal ini relasi antara aktor selalu berpegang teguh pada kepentingan setiap aktor. Problematika ini menyebabkan tata kelola objek pariwisata pantai sebanjar menjadi terbengkalai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengelolaan objek wisata Pantai Sebanjar dalam mendukung tata kelola pariwisata dan mensejahterakan masyarakat Desa Alor Besar khususnya dan masyarakat kabupaten Alor umumnya yang telah penulis jelaskan sebelumnya,

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama pengelolaan wisata Pantai Sebanjar berdasarkan pandangan Foucault dalam teori kekuasaan yakni: kekuasaan bukanlah kepemilikan tetapi strategi, kuasa ada dimana-mana, kuasa bekerja melalui normalisasi dan regulasi, kuasa bersifat produktif.

Tata kelola objek pariwisata pantai Sebanjar dapat dilihat dari empat pandangan Foucault bahwa sesungguhnya pengelolaan pariwisata bisa berjalan lancar apa bila kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang tidak mutlak atau bersifat individual melainkan kekuasaan harus dihargai sebagai hal yang mendukung ruang produktifitas. Upayah pemerintah kabupaten Alor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata justru kemudian berbenturan dengan kepentingan aktor – aktor dalam hal ini masyarakat yang juga merasa memiliki kekuasaan atas ruang tersebut. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa tata kelola objek wisata pantai Sebanjar tidak akan berjalan dengan baik sebab relasi antar aktor yang memiliki kepentingan atas ruang tersebut masih memandang kekuasaan adalah milik perorangan yang menyebabkan keputusan terkait pengelolaan objek wisata tersebut belum final.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Alor. (2021). Kecamatan Alor Barat Laut dalam angka 2021. Diakses dari <https://alorkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/dfbf7be68a73ecffefeada80/kecamatan-alor-barat-laut-dalam-angka-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Alor. (2024). Kabupaten Alor dalam angka 2024. Diakses dari <https://alorkab.bps.go.id>
- Junaid, I., & Salim, M. A. (2019). Peran organisasi tata kelola dalam pengelolaan desa wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i1.6>
- Kadji. (2015). Optimalisasi tata kelola sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo. Dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Khozin, A. (2012). Konsep kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1), 132–149.
- Maleong, J. L. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Novaria, R., & Rohimah, A. (2017). Pengembangan community based tourism sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan pemasaran pariwisata di Wonosalam, Kabupaten Jombang.
- Rahayu. (2021). Tata kelola pariwisata global di Kota Palembang. Dalam *Jurnal Penelitian*

Sosial dan Politik.

- Rahma. (2021). Peran Dinas Pariwisata dalam tata kelola pengembangan wisata Pantai Mampie untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*.
- Rangkuti, F. (2005). *Analisis SWOT: Teknik membedakan kasus bisnis*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- RPJMDes. (2022). Profil Desa Alor Besar.
- Santoso. (2015). Peranan dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Dalam *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*.
- Sinaga, (2010). Potensi dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Kertas Karya*, Program DIII Pariwisata, Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Suparto. (2019). Teori pemisahan kekuasaan dan konstitusi menurut negara barat dan Islam. Dalam *Jurnal Hukum Islam*.
- Syakra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1). Jakarta: LIPI.
- Yunarni. (2019). Peran Dinas Pariwisata dalam tata kelola dan promosi kawasan pariwisata. Dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Zulhadi. (2018). Implementasi kebijakan collaborative governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dalam *Jurnal Ulul Albab*.